

ABSTRAK

Penyitaan adalah suatu upaya hukum untuk melindungi kepemilikan dan/ atau penguasaan terhadap suatu benda. Dalam proses kepailitan, sita umum bertujuan untuk melindungi harta pailit supaya tidak dialihkan oleh debitor pailit atau supaya para kreditor tidak sewenang-wenang menagih haknya dari harta pailit tersebut. Sedangkan dalam proses peradilan pidana, penyitaan bertujuan untuk menjadikan benda tersebut sebagai alat bukti karena diduga merupakan hasil tindak pidana atau benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Aturan pada Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta pada Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, merupakan aturan yang sering dipertentangkan terkait sita umum kepailitan dan sita pidana, yaitu tentang mana yang lebih mendahului.

Dalam tesis ini penyusun memusatkan pembahasan pada akibat hukum dari adanya kepailitan yang diikuti dengan sita pidana oleh penyidik/ penuntut umum, dan sebaliknya. Serta pada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator, dan juga penyidik/ penuntut umum dalam upaya mencari jalan tengah demi terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak dalam perkara.

Dan yang menjadi saran penulis dalam tesis ini adalah berkaitan dengan ketiadaan hukum yang menjembatani kedua aturan tersebut di atas, serta koordinasi yang dapat dilakukan kurator dan penyidik/ penuntut umum dalam menyikapi adanya sita.

Kata Kunci: *sita umum, sita pidana, harta pailit*

ABSTRACT

Seizure is a legal effort to protect the ownership and/ or the authorization of a certain thing. In the bankruptcy, a general seizure has the aim to protect the assets, so they will not be transferred by the debtor or to make sure that the creditors will not be despotic to ask for their rights from those assets. In the other hand, at the criminal court system, a seizure is held at the point that the investigator or the public prosecutor think that it was an outcome of a criminal act or used in the criminal act, so that it will be used in the verification stage. Article 31 paragraph (2) of Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and The Postponement of Debt Payment Obligations, and Article 39 Paragraph (2) of The Criminal Procedure Code, are the two laws that often being compared, about which one is stronger than the other, the general seizure or the criminal seizure. Author, in this Thesis, is focus on the law consequences of the bankruptcy follows by a criminal seizure by the investigator or public prosecutor, vice versa. And on the Receiver's efforts, and also the efforts of the investigator or public prosecutor, to find a way out, in order to fulfill the intention of each party. Author's proposition in this Thesis is about the vacuum of law in which there is no law in between those two procedures, and also the coordination between the Receiver in bankruptcy and the investigator or the public prosecutor, to handle a seizure.

Key words: *general seizure, criminal seizure, assets of bankruptcy*

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua,

Penulis sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kekuatan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **“Konflik Kewenangan Sita Umum Kepailitan dan Sita Pidana (Studi Kasus Kepailitan PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari (Dalam Pailit) serta Kepailitan PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit))**. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum, minat studi Peradilan, pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis tidak menutup diri akan adanya masukan dan saran terkait penulisan Tesis ini.

Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada suami terkasih Chandra Nadhi, S.H., M.H., anakku Joyce Imanuel Chandra, papa tercinta Widiprianto, mama tercinta Sri Yuniati, mama mertua tercinta Indah Koesoemarini, serta adik-adik yang telah banyak membantu dan mendoakan dalam penyelesaian studi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Somad, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum;
3. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., selaku Dosen Pembimbing, Dosen MKPT, sekaligus Dosen Penguji Tesis, atas nasehat dan arahan, serta waktu yang telah diberikan sehingga Tesis ini dapat selesai dengan baik;
4. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen MKPT sekaligus Dosen Penguji Tesis;
5. Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Tesis;
6. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Tesis;
7. Para Guru Besar, Staf Pengajar, dan Staf Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
8. Rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Tidak lupa penulis memohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tesis ini berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih.

Surabaya, 15 Januari 2020

Penulis,

Imanuel Rahmani, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Burgelijk Wetboek (BW)
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus
 - Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 726
3. RIB/ HIR
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
5. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
 - Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131
 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443